

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Denny Indrayana, "Putusan Pilkada Depok Batal Demi Keadilan", Kompas, Selasa, 9 Agustus 2005.
- Dieter Nohlen, *Elections and Electoral Systems, Democracy and Social Change*, Friedrich Ebert Stiftung, Germany, 1993.
- Franz Magnis Suseno. *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Departemen Penerangan, Jakarta, 1962.
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru. Jakarta, 1977.
- Jessica Korn, *The Power of Separation*, Princeton University Press, Princeton . New Jersey, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung. 2004.
- Loina Lalolo Krina P.. *Indikator dan Alat Ukur Akuntabilitas, Transparensi, dan Partisipasi*, <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id>, 2003.
- Mac Iver, R.M., *The Modern State*, Oxford University.
- Michael T. Molan, *Constitutional Law: The Machinery of Government*, Old Baley Perss, London, 2003.
- Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Biduan HP. *Hukum Administrasi Negara*, UIH Press, Yogyakarta, 2003.

Rod Hague, Martin Harrop, dan Shaun Breslin, *Comparative Government and Politics*, Macmillan Press LTD., London, 1998.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

S. Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Subhan Afifi, *Televisi Lokal dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, dalam buku Subhan Afifi, Nikolaus Loy, dan Susilastuti, ed., *Pilkada Langsung dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, FISIP UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2006.

Ubaidilah, A., et.al., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III, dan IV.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.